

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah disajikan dan dianalisis berdasarkan teori pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini peneliti merumuskan rekomendasi saran-saran yang dapat bermanfaat untuk mewujudkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang efektif.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dapat disimpulkan yaitu :

1. Pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo sejauh ini telah terlaksana secara tepat waktu, baik penyaluran dana bantuan pangan dari pemerintah ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maupun penyaluran dana bantuan operasional e-warong dari pemerintah ke pengelola e-warong. Penyaluran dana dari pemerintah ke KPM dilakukan setiap tanggal 25 atau paling lambat tanggal 26. Sedangkan penyaluran dana bantuan operasional e-warong dari pemerintah ke pihak penyalur juga diterima setiap tanggal 25. Adanya ketepatan waktu dalam proses penyaluran dana bantuan ini membuat efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo dari segi waktu sejauh ini berjalan efektif.

2. Ketepatan dalam menentukan pilihan pada pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo diidentifikasi berdasarkan ketepatan dalam menentukan pilihan sasaran dan ketepatan dalam menentukan pilihan kebutuhan. Penentuan penerima/sasaran dari program BPNT dinilai masih kurang tepat. Hal ini dikarenakan kurangnya pembaharuan data dan informasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal lain yang menjadi alasan kurangnya pembaharuan informasi adalah minimnya edukasi dan sosialisasi kepada KPM tentang tujuan dari program BPNT ini. Sedangkan ketepatan pilihan kebutuhan yang mewajibkan penukaran BPNT dengan kebutuhan/komoditi hanya terbatas pada beras dan telur dinilai cukup baik namun masih memerlukan perbaikan juga. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan bahwa perlu adanya penambahan pilihan kebutuhan agar program BPNT semakin bermanfaat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program BPNT berdasarkan indikator ketepatan penentuan pilihan masih kurang efektif.
3. Ketepatan sasaran penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai instrumen dalam program BPNT di Kecamatan Wonocolo masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Hal ini dikarenakan adanya indikasi kurang tepatnya sasaran penerima BPNT yang dapat diidentifikasi melalui KKS. Dengan adanya sistem KKS tersebut, terdapat KPM yang menumpuk dana bantuannya atau sengaja tidak mengambil bantuan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu, instrumen-instrumen pendukung KKS, seperti *signal* / jaringan internet, mesin *Electronic Data Capture (EDC)*, bahan pasokan dan

listrik juga masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo berdasarkan ketepatan-ketepatan sasaran penggunaan KKS dinilai masih belum efektif.

4. Pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo pasti memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah yaitu Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai pihak penyelenggara program BPNT ditingkat daerah melakukan berbagai upaya dan langkah strategis dengan harapan tujuan program BPNT dapat tercapai. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah Dinas Sosial cukup baik, namun masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan agar dapat menyelesaikan permasalahan dan menjangkau sasaran secara lebih nyata. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo berdasarkan ketepatan-tujuan dinilai masih belum efektif.
5. Dari hasil penelitian yang dilihat dari indikator ketepatan penentuan waktu, ketepatan penentuan pilihan, ketepatan penentuan tujuan, dan ketepatan-ketepatan sasaran dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wonocolo masih belum efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Memperbaiki pendataan penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui survei lapangan oleh aparat pemerintah setempat, agar data penerima bantuan akurat dan bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2. Untuk mendukung terwujudnya data penerima program BPNT yang akurat, pihak pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi secara berkala. Hal ini berkaitan dengan kurangnya kesadaran Keluarga Penenerima Manfaat (KPM) BPNT tentang hak dan kewajiban KPM BPNT sesuai peraturan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran pendamping program BPNT yang bekerja di lapangan agar lebih peduli dan tanggap tentang kondisi, situasi, dan persoalan yang dihadapi KPM.
4. Memperbaiki dan meningkatkan sistem kerja Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana pendukung KKS, peningkatan kemampuan pengelola e-warong tentang cara pengendalian masalah pada KKS.
5. Dalam melaksanakan upaya-upaya pencapaian tujuan program BPNT, selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat (Kementerian Sosial) dan pemerintah daerah (Kelurahan dan Kecamatan), Dinas Sosial dapat menyusun langkah-langkah strategis yang membawa dampak dan perubahan secara langsung di lapangan, yaitu pada KPM BPNT Kecamatan Wonocolo.